

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Teguh Karya Pamungkas¹, Siti Afifatur Rohmah²

^{1,2}Universitas Islam Jember, Indonesia

Corresponding author email: teguhkaryapamungkas@gmail.com, ifaaaafifa@gmail.com

Article info

Article history:
Received : 14 Juni 2026
Accepted : 26 Juni 2026
Published : 30 Juni 2026

Keywords:
BUMDes,
pemberdayaan
ekonomi masyarakat,
pembangunan
partisipatif, ekonomi
desa.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian ekonomi warga desa. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan pengelolaan unit usaha BUMDes, sedangkan penelitian ini berfokus pada proses pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, pembukaan lapangan kerja, dan pengembangan usaha produktif masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, pengurus BUMDes, pengelola unit usaha, dan masyarakat yang terlibat dalam program BUMDes. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Wirowongso berperan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui empat program utama, yaitu penyediaan peluang usaha, pembukaan lapangan kerja, program simpan pinjam, serta pelatihan dan pendampingan UMKM. Peran tersebut berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat, bertambahnya pendapatan masyarakat desa, berkembangnya UMKM lokal, serta meningkatnya keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha produktif. Secara empiris, jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan BUMDes meningkat dari sekitar 15–30 orang pada tahun 2020–2021 menjadi lebih dari 200 orang secara kumulatif pada tahun 2025. Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan BUMDes dipengaruhi oleh modal sosial masyarakat, partisipasi aktif warga, serta dukungan pemerintah desa. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan modal, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, dan pengelolaan usaha yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pengelola, serta dukungan pemerintah secara berkelanjutan agar BUMDes mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi

DOI:

masyarakat desa secara optimal.

Abstract

This study aims to analyze the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in enhancing community economic empowerment in Wirowongso Village, Ajung District, Jember Regency. The study is motivated by the importance of BUMDes as a village economic institution that is not only oriented toward economic profit but also toward community empowerment through improving the capacity, participation, and economic independence of village residents. Previous studies have mainly focused on increasing Village Original Revenue (PADes) and managing BUMDes business units, whereas this study emphasizes the process of community economic empowerment through training, mentoring, job creation, and the development of productive community enterprises. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The research informants consisted of the Village Head, BUMDes administrators, business unit managers, and community members involved in BUMDes programs. Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. Data validity was tested through source triangulation. The findings indicate that Wirowongso BUMDes plays a significant role in improving community economic empowerment through four main programs: providing business opportunities, creating employment opportunities, implementing savings and loan programs, and conducting training and mentoring for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). These roles have contributed to increased community participation, higher village household incomes, the growth of local MSMEs, and improved community skills in managing productive businesses. Empirically, the number of community members involved in BUMDes activities increased from approximately 15–30 people in 2020–2021 to more than 200 people cumulatively in 2025. The study also found that the success of BUMDes is influenced by community social capital, active citizen participation, and support from the village government. However, several challenges remain, including limited capital, low human resource capacity, and suboptimal business management. Therefore, institutional strengthening, capacity building for managers, and continuous government support are needed to enable BUMDes to function optimally as an instrument for community economic empowerment in rural areas.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar, namun sering kali belum dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, masih banyak masyarakat desa yang mengalami keterbatasan akses ekonomi, rendahnya pendapatan, dan minimnya kesempatan kerja. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengelola potensi yang dimiliki. Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang dibentuk untuk mengelola potensi lokal secara profesional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes memiliki fungsi ekonomi sekaligus fungsi sosial. Fungsi ekonomi diwujudkan melalui pengelolaan unit-unit usaha yang mampu menghasilkan keuntungan dan meningkatkan pendapatan desa. Sementara fungsi sosial diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, serta pemberian akses permodalan kepada masyarakat.

Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember merupakan salah satu desa yang memiliki BUMDes aktif bernama BUMDes Wirowongso Merdeka. BUMDes ini berdiri sejak tahun 2020, dari tahun 2020 sampai 2025 masyarakat yang terlibat dalam kegiatan BUMDes sekitar 200 orang dan BUMDes ini telah mengelola beberapa unit usaha seperti program simpan pinjam, UMKM suwar-suwir, kolam pemancingan, lapangan olahraga, serta usaha kantangan dan pembuatan sangkar burung. Berbagai unit usaha tersebut melibatkan masyarakat secara langsung sehingga memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan. Keberadaan BUMDes Wirowongso Merdeka menarik untuk diteliti karena mampu memanfaatkan potensi lokal sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BUMDes dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

KAJIAN TEORI

. Penelitian mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada kontribusi BUMDes terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes), sedangkan kajian yang menganalisis peran BUMDes sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji secara lebih

mendalam peran BUMDes dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember dengan menggunakan perspektif teori pemberdayaan masyarakat, teori peran, dan teori pemberdayaan ekonomi desa.

Konsep pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran Edi Suharto (2014) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses meningkatkan kemampuan masyarakat agar memiliki akses terhadap sumber daya, mampu mengambil keputusan, serta memiliki kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas, partisipasi, dan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki. Pendapat tersebut diperkuat oleh Jim Ife (2008) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh kontrol yang lebih besar terhadap sumber daya ekonomi, sosial, maupun politik yang memengaruhi kehidupannya. Dalam konteks pembangunan desa, konsep tersebut relevan dengan keberadaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif dan pemanfaatan potensi lokal desa.

Perspektif pemberdayaan tersebut diperkuat oleh penelitian Muhammad Zainulmajid et al. (2020) yang menunjukkan bahwa BUMDes berperan dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan unit usaha berbasis potensi lokal. Penelitian tersebut menemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi desa mampu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha secara mandiri. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan BUMDes tidak hanya diukur dari keuntungan ekonomi yang diperoleh lembaga, tetapi juga dari kemampuan BUMDes dalam menciptakan proses pemberdayaan yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini, teori pemberdayaan digunakan untuk menganalisis bagaimana BUMDes Wirowongso Makmur meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui program simpan pinjam, pengembangan UMKM suwar-suwir, pelatihan usaha, dan pengembangan usaha sangkar burung.

Selain teori pemberdayaan, penelitian ini juga menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (2002). Menurut Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan yang diwujudkan melalui pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang atau lembaga dalam kehidupan sosial. Teori ini menjelaskan bahwa setiap lembaga memiliki fungsi tertentu yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dalam konteks penelitian ini, BUMDes memiliki kedudukan sebagai lembaga ekonomi

desa yang berfungsi mengelola potensi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi produktif.

Pandangan tersebut sejalan dengan penelitian Nurdiyanti dan Hailuddin (2021) yang menemukan bahwa BUMDes mampu menjalankan perannya sebagai fasilitator ekonomi masyarakat melalui penyediaan akses permodalan dan pengembangan usaha produktif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai unit bisnis desa, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, teori peran digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana BUMDes Wirowongso Makmur menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Penelitian ini juga menggunakan teori pembangunan partisipatif yang dikemukakan oleh Robert Chambers (1995). Menurut Chambers, pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program pembangunan. Pendekatan partisipatif menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang memiliki hak untuk menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Pendekatan ini diyakini mampu menciptakan pembangunan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

Konsep pembangunan partisipatif tersebut diperkuat oleh penelitian Irkham Abdur Rohchim (2019) yang menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan BUMDes sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam menjalankan unit usaha desa. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha BUMDes, semakin besar pula peluang keberhasilan program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan. Dalam penelitian ini, teori pembangunan partisipatif digunakan untuk menganalisis keterlibatan masyarakat Desa Wirowongso dalam pengelolaan berbagai unit usaha BUMDes seperti kolam pemancingan, lapangan olahraga, usaha suwar-suwir, dan usaha kantangan burung.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan ekonomi desa yang dikemukakan oleh Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2012). Menurut teori tersebut, pemberdayaan ekonomi desa merupakan proses peningkatan kemampuan masyarakat melalui penguatan akses terhadap modal, teknologi, informasi, dan pasar guna menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Keberhasilan pemberdayaan ekonomi tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Teori tersebut diperkuat oleh penelitian Ade Eka Kurniawan (2020) dan Zalifatul Muyasaroh (2021) yang menunjukkan bahwa BUMDes mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal desa. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa keberadaan BUMDes dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi desa yang efektif apabila dikelola secara profesional dan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam penelitian ini, teori pemberdayaan ekonomi desa digunakan untuk menganalisis kontribusi BUMDes Wirowongso Makmur dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Desa Wirowongso.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa teori pemberdayaan masyarakat, teori peran, teori pembangunan partisipatif, dan teori pemberdayaan ekonomi desa saling melengkapi dalam menjelaskan peran BUMDes sebagai instrumen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Keempat teori tersebut menjadi landasan analisis untuk memahami bagaimana BUMDes Wirowongso Makmur menjalankan fungsi ekonominya sekaligus fungsi sosialnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian berada di Desa Wirowongso Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa, pengurus BUMDes, pengelola unit usaha, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan BUMDes. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi: Reduksi data, Penyajian data, Penarikan Kesimpulan, Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDes Wirowongso Merdeka pada 20 September 2020 melalui Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2015. Berdasarkan struktur organisasinya, Kepala Desa (Adi Purnomo) bertindak sebagai Penasihat, sementara operasional harian dipimpin oleh Feri Akbar (Ketua), Samsul Arifin (Sekretaris), dan Lilawati (Bendahara). Kelembagaan ini mengelola dua pilar utama, yaitu Unit Pengelolaan Usaha (UMKM, Lapangan Olahraga, Kolam Pancing, Kantangan Burung) serta Unit Usaha Simpan Pinjam, dengan modal awal yang bersumber dari APBDes, penyertaan modal masyarakat, hibah pemerintah, kerja sama pihak ketiga, dan akumulasi laba bersih.

Eksistensi BUMDes Wirowongso Merdeka memberikan dampak nyata bagi perekonomian warga melalui tiga program utama. Pertama, dalam memfasilitasi UMKM, BUMDes berhasil memperluas jangkauan pasar pelaku usaha lokal dan meningkatkan pendapatan mereka, seperti pada komoditas suwar-suwir unggulan desa. Partisipasi masyarakat juga melonjak tajam dari yang awalnya hanya 15–30 orang di tahun 2020 akibat kurangnya pemahaman, menjadi lebih dari 200 orang pada periode 2024–2025 berkat sosialisasi yang masif. Kedua, BUMDes membuka lapangan pekerjaan baru lewat manajemen unit rekreasi dan olahraga. Unit Kolam Pemancingan yang dikelola Pak Asmad menyerap tenaga kerja lokal dan membukukan kenaikan pendapatan tahunan yang signifikan, dari Rp1.000.000 (2021) menjadi Rp9.000.000 (2024) dengan skema tarif masuk Rp20.000 hingga Rp40.000. Sementara itu, Unit Lapangan Olahraga menerapkan dualisme tarif sewa per jam (Rp15.000–Rp20.000 untuk warga lokal dan Rp30.000–Rp50.000 untuk luar desa), yang sukses mendongkrak pendapatan unit dari Rp3.600.000 (2022) menjadi Rp9.200.000 (2024), sekaligus menghidupkan warung-warung mikro di sekitarnya. Ketiga, dalam aspek permodalan, Unit Simpan Pinjam yang dipimpin Pak Ulyadi menyediakan pinjaman modal kredit lunak bagi pelaku usaha ekonomi lemah dengan plafon Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Menggunakan suku bunga rendah sebesar 2% dan syarat jaminan KTP yang mudah, unit ini efektif memotong ketergantungan warga terhadap rentenir melalui penyaluran modal gulir secara bertahap. Pembahasan (Analisis Teoretis)

Secara teoretis, operasionalisasi BUMDes Wirowongso Merdeka mencerminkan fungsinya sebagai institusi ekonomi sekaligus institusi sosial bagi masyarakat pedesaan. Jika dibedah dengan Teori Pemberdayaan Masyarakat (Edi Suharto), aktivitas BUMDes telah memenuhi tiga tahapan krusial: tahap penyadaran melalui sosialisasi intensif untuk mereduksi resistensi warga; tahap penguatan kapasitas melalui penyediaan lapak fisik dan akses modal; serta tahap penguatan mandiri di mana pemuda setempat mampu mengelola unit usaha secara berkesinambungan. Keberhasilan pembentukan kapasitas ini didorong oleh penguatan SDM, optimalisasi SDA, ketersediaan modal, dan perluasan sarana pemasaran (Hutomo dkk.). Lebih lanjut, berdasarkan Teori Pembangunan Partisipatif (Robert Chambers; Jim Ife), BUMDes berhasil mengubah paradigma pembangunan dari top-down menjadi bottom-up dengan mendelegasikan pengelolaan bisnis langsung kepada warga, yang berimplikasi pada penurunan angka pengangguran terbuka di desa. BUMDes ini juga telah mengimplementasikan prinsip tata kelola ekonomi desa yang kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan (Sutoro Eko) melalui sistem pelaporan berkala dan pembagian insentif yang proporsional. Kendati demikian, perkembangannya masih dibatasi

oleh kendala struktural berupa keterbatasan modal kerja, rendahnya kualitas SDM dalam manajemen bisnis modern, serta tata kelola beberapa unit yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan intervensi regulasi, pembinaan manajerial, dan penguatan aspek hukum dari pemerintah desa agar roda ekonomi BUMDes dapat berputar secara berkelanjutan.

SIMPULAN

BUMDes Wirowongso memiliki peran penting dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyediaan peluang usaha, pembukaan lapangan kerja, program simpan pinjam, serta pelatihan dan pendampingan UMKM. Program-program tersebut berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat, berkembangnya usaha produktif masyarakat, serta meningkatnya pendapatan masyarakat desa.

Keberhasilan BUMDes dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, modal sosial, dan dukungan pemerintah desa. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan modal, kapasitas sumber daya manusia yang rendah, dan pengelolaan usaha yang belum optimal.

REFERENSI

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Freire, P. (2008). *Pedagogy of the Oppressed*. Continuum.
- Ife, J. (2008). *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation*. Pearson Education.
- Majdi, M. Z., Sulistiawati, F., & Muhammad, N. (2020). Peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial*, 5(2), 120–132.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Putnam, R. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama.
- Sutoro Eko. (2018). *Desa Membangun Indonesia*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.

Jurnal:

- Majdi, M. Z., Sulistiawati, F., Muhammad, F., & Nurhastuti. (2020). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan ekonomi

masyarakat di Desa Mas-Mas Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 3(1), 35–40.

Hailuddin, H., & Nurdyanti, R. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 7(2), 213–221.

Aminy, A., Rahman, A., & Setiawan, D. (2019). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 45–56.

Fauziah, N., & Rifa, M. (2021). Strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM desa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 22(1), 66–78.

Raudah, R., & Maulana, A. (2023). Peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 101–112.

Satar, L., & Al Fariqi, M. (2022). Pengelolaan BUMDes dalam pengembangan ekonomi desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1), 89–99.

Dokumen Resmi Pemerintah

Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2015). Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: Kemendesa PDTT.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2021). Panduan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: Kemendesa PDTT.